BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan bagian yang paling penting keterkaitannya dengan keberlangsungan suatu lembaga atau perusahaan. Laporan keuangan merupakan bentuk penyajian informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, dimana informasi laporan keuangan tersebut akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus benar-benar akurat, terbebas dari salah saji yang material dan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Namun tidak dipungkiri masih terdapat perusahaan/lembaga pemerintahan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan tersebut merugikan pihak yang berkepentingan.

Fraud (kecurangan akuntansi) hingga saat ini menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun di negara maju. *Fraud* atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini terjadi hampir diseluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta. Di Indonesia *fraud* berkembang dengan sangat cepat dan meluas serta seperti telah membudaya. Istilah *fraud* atau kecurangan akuntansi lebih dikenal dengan sebutan korupsi dan korupsi sangat identik

dengan lembaga pemerintah. Korupsi sudah ada sejak era sebelum kemerdekaan. Korupsi seringkali dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Dalam korupsi, tindakan yang sering dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi.

Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan (Fitrawansyah, 2014:16).

Peran utama auditor internal berupaya untuk mengeliminasi sebab-sebab timbulnya *fraud* tersebut. Pencegahan *fraud* lebih mudah dilakukan daripada mengatasinya bila *fraud* itu telah terjadi. Internal auditor bertanggung jawab untuk membantu mencegah *fraud* melalui pemeriksaan dan pengevaluasian kecukupan efektivitas pengendalian internal, setara dengan tingkat potensi risiko di berbagai segmen organisasi. Hal lain yang menyebabkan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap *fraud* adalah pertimbangan kerugian. Faktor individu auditor internal yang menjadi tumpuan agar kinerja seorang auditor baik salah satunya adalah profesionalisme. Kualitas hasil kinerja auditor internal sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya sebagai unsur Profesionalisme (Hery 2010 : 67).

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas yang dimiliki auditor internal yang mana merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pengawasan perusahaan. Dengan adanya profesionalisme dari auditor internal, diharapkan dapat diambil langkah untuk mendeteksi juga mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin bisa terjadi. Saran dan sikap korektif dari auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah kejadian penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan.

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Menurut Sawyer (2009 : 35) Audit internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Hanya dengan begitu auditor internal bisa disebut melaksanakan audit dengan profesional. Dengan memiliki profesionalisme seorang auditor diharapkan dapat memiliki kinerja yang baik agar perusahaan atau organisasi dapat terhindar dari ketidakpatuhan akan rekomendasi dan kasus kasus yang marak terjadi.

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas dan profesionalisme pada auditor internal merupakan salah satu kunci dalam menjalankan profesinya dengan baik dan benar. Profesionalisme akan meningkat dengan sendirinya seiring dengan perkembangan sikap mental auditor internal sendiri dalam

melakukan pekerjaannya. Dengan adanya profesionalisme yang handal maka diharapkan seorang auditor internal dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi setiap kejadian yang terjadi dimasa yang akan datang dan mengungkapkannya dalam temuan audit. Saran dan sikap korektif dari auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan (Asikin, 2006).

Selain itu profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Menurut Hiro Tugiman (2011:20-27) bagi pemeriksa intern, untuk melakukan pengawasan yang baik harus memiliki profesionalisme.

Profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting, sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur, profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional. Profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang profesional auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Dengan semakin profesional, auditor internal diharapkan akan menjadi lebih ahli dalam mencegah terjadinya fraud (Hery, 2013:80).

Oleh karena itu dapat disimpulkan jika seorang auditor tidak memiliki atau telah kehilangan profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah

dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang terhadap auditor tersebut. Oleh karena itu profesionalisme sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan dengan tepat waktu. Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seorang auditor, Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan terjamin.

Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ditentukan.

Dalam mewujudkan *good governance* ini, terlihat dengan pembentukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dimaksud adalah inspektorat.

Dalam PER/05/M.PAN/03/2008 dikatakan bahwa pengawasan intern di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kepemimpinannya. Secara umum peran dan fungsi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam

melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Secara teoritis kehadiran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seharusnya menjadi salah satu sebab kinerja pemerintah daerah itu akan semakin baik. Namun pada saat ini, walaupun peran dan fungsi Inspektorat telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, tetapi masih banyak auditor internal di Inspektorat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Dalam hal ini ada beberapa fenomena yang terjadi di beberapa Inspektorat di daerah , fenomena yang pertama adalah Auditor Internal di Inspektorat beberapa daerah banyak yang tidak independen, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada hari Jumat (15/9/2017) disampaikan di gedung KPK, menilai Auditor Internal di Inspektorat beberapa daerah banyak yang tidak independen dan terjerat kasus korupsi, karena kebanyakan dari inspektorat tersebut dipilih oleh kepala daerah yang tidak baik, tidak berintegritas, dan tidak berkomitmen, dan menunjuk inspektorat sesuai seleranya. Kepala daerah tersebut memilih inspektorat yang mampu melindungi kepentingannya. Dengan adanya hal itu kinerja Inspektorat saat ini amat wajar jika banyaknya kasus korupsi. Marwata menyampaikan pembenahan struktural harus segera dilakukan dan diperkuat agar dapat mencegah korupsi dan inspektorat akan

menjadi lembaga yang independen. (Di Kutip dari <https://nasional.sindonews.com>, Jumat, 15 September 2017).

Fenomena kedua yang terjadi yaitu Inspektorat dinilai belum paripurna mencegah korupsi bertahun-tahun, inspektorat hanya menjadi semacam pelengkap dalam struktur pemerintahan. Sepanjang 2009-2014, dari 439 kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, 45,33 persen melibatkan penyelenggara pemerintahan, sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut korupsi. Inspektorat seperti tak hadir mencegah maraknya penyimpangan. Inspektorat juga belum mampu mencegah korupsi serta memberikan jaminan atas efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah. Kondisi lain yang dihadapi inspektorat adalah minimnya jumlah auditor. Dari kebutuhan sekitar 40.000 auditor, yang tersedia baru sekitar 11.000 orang. Meski demikian, melalui inpres Nomor 9 tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014, tim penyusun mencoba cara lain agar penguatan Inspektorat tetap bisa dicapai. Di antaranya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, kepala inspektorat harus memiliki sertifikat khusus. Selain itu seluruh aparat pengawasan di Inspektorat harus memiliki sertifikasi fungsional auditor. (Di Kutip dari <https://nasional.kompas.com>, Kamis, 26 Maret 2015)

Fenomena yang ketiga adalah Inspektorat Pulau Morotai akui temukan anggaran fiktif dibagian humas Setda Pulau Morotai. Bahkan anggaran tersebut telah di audit dan diproses ke pemimpin (Bupati) untuk diketahui. Kepala Inspektorat pulau Morotai Marwanto P Soekidi kepada wartawan di ruang kerjanya (Kamis, 29/8/2019) mengungkapkan Inspektorat sudah melakukan

audit sehingga masalah tersebut, saat ini masih dalam proses di pimpinan dikarenakan pengeluarannya tidak sesuai ketentuan. Anggaran media yang disalahgunakan itu, berindikasi merugikan negara setelah diaudit. Meskipun begitu Marwanto mengaku lupa angka kerugian. (Di Kutip dari kabarmalut.co.id Kamis, 29 Agustus 2019).

Dengan adanya fenomena-fenomena di atas, menjadi catatan tersendiri bagi kinerja auditor internal inspektorat, karena untuk menghasilkan kinerja auditor internal yang baik harus ditunjang oleh auditor yang memiliki sikap independen serta mempunyai komitmen yang kuat. Namun yang terjadi dilapangan masih ada auditor yang tidak memiliki profesionalisme, independen dan tidak mempunyai komitmen yang kuat dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sehingga masih banyak kasus-kasus atau fenomena-fenomena menyimpang yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah seperti kasus-kasus yang terjadi pada uraian fenomena sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Mimin dan Desy Nurhakim (2015) yaitu dengan judul Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

Perbedaan penelitian yang diangkat peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu di Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan di Perusahaan BUMN di kota Bandung, lalu perbedaan selanjutnya yaitu waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sedangkan

penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuesioner.

Alasan penulis melakukan penelitian di Inspektorat karena Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah, dimana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal. Sehingga Inspektorat berperan penting dalam proses mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN” (Survey pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, profesionalisme merupakan salah satu elemen penting bagi auditor untuk melakukan pencegahan. Namun demikian masih banyaknya kasus *fraud* pada instansi negara menjadi indikasi bahwa profesionalisme auditor dalam menjalankan tugas auditnya masih dianggap lemah yaitu :

1. Auditor Internal di Inspektorat masih banyak yang melakukan kecurangan dan terjerat kasus korupsi karena Auditor Inspektorat

tersebut tidak memiliki sikap profesional dan melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

2. Auditor Internal di Inspektorat masih belum mampu mencegah kecurangan karena sebagian besar Auditor tidak independen dan kinerjanya kurang maksimal.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profesionalisme Auditor Internal pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya
2. Bagaimana Efektivitas Pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya
3. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Profesionalisme Auditor Internal pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini tidak hanya digunakan oleh penulis saja, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan sudut pandang yang berbeda, kegunaan praktis dan kegunaan teoritis akan dijelaskan untuk siapa saja penelitian ini bermanfaat.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi di bidang akuntansi khususnya auditing di masa yang akan datang. Selain itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kegunaan praktis

A. Bagi Penulis

Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam ilmu auditing, khususnya audit kecurangan atau audit investigasi untuk mengungkapkan kecurangan yang sering terjadi dalam perusahaan.

B. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan bahan pertimbangan perusahaan dalam usaha mendeteksi kecurangan.

C. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi atau sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis dan dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya yang lokasinya di Sukaasih Singaparna Kabupten Tasikmalaya, Jawa Barat 46415. Penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh kantor yaitu pada bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan selesai.